



Anggaran MBG Kurang Rp7,5 Miliar

Pemkab Gunungkidul Kaji Kemungkinan Tambal Dana Pakai Silpa 2024

GUNUNGKIDUL, TRIBUN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul masih menunggu petunjuk teknis (juknis) terkait penggunaan anggaran program makan bergizi gratis (MBG). Sejauh ini, Pemkab telah mengalokasikan dana Rp12,2 miliar untuk program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut.

"Kami belum bisa menggunakan alokasi dana tersebut, pasalnya juknis belum kami terima, jadi belum tahu pos-pos anggaran ini ke mana saja nantinya," tutur Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono, Minggu (23/2).

Putro menyebut, pihaknya juga masih memiliki kekurangan anggaran untuk program MBG sebesar Rp7,5 miliar. Pasalnya, alokasi dana program MBG di Gunungkidul dibutuhkan sebesar Rp19,5 miliar. Ketentuan ini mengacu kepada kemampuan keuangan yang dimiliki pemkab sehingga setiap wilayah memiliki pagu berbeda-beda.

"Jadi, saat ini yang sudah ada alokasinya Rp12,2 miliar tadi. Rencananya kekurangan pagu Rp19,5 miliar ini akan dipenuhi pada saat pembahasan APBD Perubahan 2025. Kekurangan dipenuhi melalui kajian tentang pendapatan hingga keberadaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) di Tahun Anggaran 2024," ucap dia.

Anggota Komisi B DPRD Gunungkidul, Ery Agustin, menyebutkan, sedianya alokasi untuk program MBG di Gunungkidul sebesar Rp27 miliar. Namun, karena keterbatasan anggaran pemerintah harus melakukan pengurangan. Pihaknya pun berharap pemerintah pusat dapat segera menuntaskan juknis agar

TUNGGU JUKNIS

- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul masih menunggu petunjuk teknis (juknis) terkait penggunaan anggaran program makan bergizi gratis (MBG).
- Sejauh ini, Pemkab telah mengalokasikan dana Rp12,2 miliar untuk program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut, dan masih ada kekurangan Rp7,5 miliar.
- Rencananya, kekurangan pagu anggaran akan dipenuhi pada saat pembahasan APBD Perubahan 2025.

bisa segera mengoptimalkan anggaran yang ada.

"MBG adalah program strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan di Gunungkidul," urainya.

Sementara itu, sasaran pelaksanaan MBG di Gunungkidul bertambah satu sekolah. Sebelumnya, program ini sudah bergulir di DN 1 Wonosari dan SMPN 1 Wonosari, kini merambah ke SMKN 3 Wonosari.

Komandan Kodim 0730 Letkol Inf Roni Hermawan mengatakan bertambahnya satu sekolah tersebut setelah dilakukan evaluasi pada pelaksanaan perdana yang dilaksanakan di SDN 1 Wonosari dan SMPN 1 Wonosari, pada Senin (17/2) lalu. "Dari evaluasi itu, kami mulai memperbaiki kendala-kendala yang ada. Dan, akhirnya pada Kamis (20/2) kemarin, kami lakukan perluasan layanan ke SMKN 3 Wonosari. Alhamdulillah, sejauh ini berjalan lancar," tuturnya saat dikonfirmasi,

Minggu (23/2).

Ia menuturkan, di SMKN 3 Wonosari program MBG menasar sebanyak 1.194 siswa. Namun, pada pelaksanaan perdananya hanya melayani 700 siswa, sebab sisanya sedang melaksanakan PKL. "Jadi, ada 494 siswa tidak mengikuti MBG, karena ada kegiatan tadi," ucapnya.

Tersisa satu sekolah

Ia mengatakan dengan bertambahnya satu sekolah ini, tersisa satu sekolah lagi yakni SMAN 1 Wonosari yang ditunjuk sebagai *pilot project* MBG di Gunungkidul. "Pelaksanaan MBG di SMAN 1 Wonosari, belum bisa dipastikan kapan. Jika dirasakan sudah sesuai dengan harapan dan tidak ada evaluasi akan ditingkatkan kembali. Karena, kami mengutamakan kualitas bukan kuantitas," jelasnya.

Dia menyebutkan, saat ini pendanaan makan gizi gratis sepenuhnya masih dari pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional. Dapur sehat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kodim 0730/Gunungkidul menasar 3.000 orang dari empat sekolah *pilot project*.

"Tentunya, jika mekanisme pelayanan sudah semakin matang dan tidak ada evaluasi, maka secara otomatis SPPG akan menambah target yang akan dilayani sesuai dengan petunjuk, termasuk ibu hamil, menyusui, dan balita yang berada di sekitar dapur sehat," kata dia.

Sementara itu, saat ditanya skema pelaksanaan MBG selama Ramadan, dia menuturkan masih menunggu petunjuk teknis. Jika tetap berjalan, makanan akan disesuaikan dengan kebutuhan berbuka puasa. "Untuk puasa kami belum monitor, masih menunggu arahan," tandasnya. (ndg)